

Kalsel Dapat Tambahan Helikopter untuk Atasi Karhutla



<https://regional.kompas.com/read/2020/10/13/12210841/kalsel-dapat-tambahan-helikopter-untuk-atasi-karhutla>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah satu helikopter untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Mujiyat mengatakan, helikopter tersebut terbilang canggih dengan dua mesin ganda atau baling-baling. Alhamdulillah telah datang helikopter untuk membantu penanganan karhutla di Kalsel. Helikopter ini kita persiapkan malam ini dan secepatnya bisa kita gunakan sesuai kepentingannya.

Dikatakan Mujiyat, helikopter ini digunakan untuk mengangkut logistik dan Alat Pelindung Diri (APD) ke lokasi terpencil di Kalsel. "Helikopter ini fungsinya Multiguna, ini nantinya akan kita fungsikan juga untuk penanganan Covid-19 seperti angkut logistik dan APD ke daerah-daerah. Untuk sementara, helikopter Chinook buatan Amerika ini akan digunakan untuk memadamkan titik api dari udara. Rencananya, helikopter ini akan berada di Kalsel selama 10 hari. Cuma 10 hari, tapi kemungkinan bisa ditambah melihat kondisi penanganan karhutla di Kalsel.

Dengan bertambahnya satu helikopter, maka total sudah 13 helikopter yang digunakan untuk penanganan karhutla. 11 helikopter water bombing untuk memadamkan titik api, dan dua lainnya digunakan sebagai helikopter pantau.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com>, Kalsel Dapat Tambahan Helikopter untuk Atasi Karhutla.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Kalsel Dapat Tambahan Helikopter untuk Tangani Karhutla.

Catatan:

✿ Definisi Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.

✿ Tugas dan Fungsi

1. KLHK:

Mengingat KLHK adalah gabungan kehutanan dan lingkungan tugas baru ditambah untuk menangani kebakaran di lahan selain kawasan hutan, memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha bila tidak memiliki SDM, sarpras dan tidak melaksanakan pengendalian kebakaran, koordinator pemulihan lingkungan hidup akibat Karhutla, meningkatkan koordinasi dan memberikan bantuan teknis untuk kerja sama regional dan internasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat Karhutla;

2. Menristekdikti:

penambahan tugas kementerian di bidang pendidikan tinggi sehingga tugas terkait Karhutla adalah mengupayakan langkah agar proses kegiatan pendidikan tidak terganggu dengan penyediaan bantuan dana bagi masyarakat yang terkena dampak Karhutla, dan mendayagunakan para dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran berpartisipasi membantu penanganan masalah kesehatan di daerah terkena dampak Karhutla;

3. Gubernur:

mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian Karhutla, melaporkan pelaksanaan pengendalian Karhutla ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan- Penambahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BMKG Perubahan secara mendasar terkait penambahan jumlah institusi yang dilibatkan. Institusi-institusi yang baru dimasukkan ini terkait peran dan fungsinya dalam rangka menata aspek sosial terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Selain itu terkait dengan konflik lahan maupun pembangunan infrastruktur. Akan tetapi yang terkait dengan pembangunan desa belum termasuk dalam institusi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla. Secara mendasar bahwa ke depan untuk pengendalian Karhutla yang berkelanjutan semetinya melibatkan pemerintahan desa.